

**STRATEGI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT**

Azaria Yacobus Kurey

NPP. 29.1861

Asdaf Provinsi Papua Barat

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: davekurey06@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on today's digitalization making and requiring everyone to be able to have expertise in using the internet as a medium to find information. This is being implemented with the local government work program to implement E-Government that can help local government performance. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and describe how the strategy of the information technology, statistics and coding service in implementing e-government within the local government of Raja Ampat Regency, West Papua Province and knowing the obstacles and efforts made in overcoming them. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the SWOT theory of F. Rangkuti. Data collection techniques using in-depth interviews (4 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** Management of population administration completeness and documents which are still done manually so that they experience difficulties as well as conventional monitoring to monitor basic needs. **Conclusion:** That the strategy of the Department of Communication, Informatics, Encryption and Statistics in the application of e-government in the scope of Raja Ampat Regency is that the service has carried out its duties and roles in accordance with its duties and functions as stated in the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 14 of 2016 concerning Guidelines for Nomenclature of Regional Apparatuses in the Field Communication and Information Technology which includes the duties and functions of the Ministry of Communication and Information Technology and is in accordance with the theory that the researcher uses, but there are also several inhibiting factors, namely the lack of facilities and infrastructure, the government area in the form of an archipelago opens access between islands which is difficult to reach and lack of budget.

Keywords: Strategy, E-Government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada digitalisasi masa sekarang membuat dan mengharuskan semua orang mampu untuk memiliki keahlian dalam menggunakan internet

sebagai media untuk mencari informasi. Hal ini yang sedang diterapkan dengan program kerja pemerintah daerah untuk menerapkan E-Government yang dapat membantu kinerja pemerintah daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana strategi dinas komunikasi informatika, statistic dan persandian dalam penerapan e-government dilinkup pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat serta mengetahui hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori SWOT dari F. Rangkuti. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (4 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Pengurusan Kelengkapan dan dokumen administrasi kependudukan yang masih dilakukan secara manual sehingga mengalami kesulitan serta pemantauan secara konvensional untuk memantau kebutuhan pokok. **Kesimpulan:** Bahwa strategi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dalam penerapan e-government pada lingkup Kabupaten Raja Ampat bahwa dinas tersebut telah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika yang di dalamnya terdapat juga tugas dan fungsi dari dinas kominfo dan telah sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, namun ada juga beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana, wilayah pemerintahan yang berbentuk kepulauan membuka akses antar pulau menjadi terbilang sulit di jangkau dan kurangnya anggaran.

Kata Kunci: Strategi, E-Government

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah suatu negara yang berbentuk kepulauan yang memiliki jumlah penduduk mencapai 270,6 juta jiwa pada tahun 2009 dengan komposisi 70% lautan dan 30% daratan serta di apit oleh 2 benua dan 2 samudera. Indonesia memiliki berbagai potensi alam di dalamnya yang mana hal ini di sebabkan karena banyaknya pulau yang terbentang dari sabang hingga merauke. Berbagai peninggalan bersejarah mulai dari zaman purbakala yang berupa tambang maupun beraneka ragam seni dan budaya hingga keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna menjadikan Indonesia memiliki modal yang membuat Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri untuk dapat di kembangkan. Tidak hanya berperan sebagai faktor pendukung semata, namun juga telah berperan sebagai Key Operational, High Potential, peran strategis dan dapat di dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi. Pesatnya perkembangan teknologi yang di era digitalisasi revolusi industri 4.0 sangat memberikan suatu pengaruh yang sangat besar terhadap terhadap kondisi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi hadir untuk menjawab masalah dan tantangan pemerintah yang timbul oleh karena adanya kemajuan digitalisasi. Hal ini sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka organisasi menjadi memiliki banyak pilihan terhadap media untuk dimanfaatkan dan dipublikasikan dalam bentuk opini publik. Perkembangan media ini sangat berpengaruh dan berdampak pada perilaku komunikasi antar orang dan masyarakat, hal ini juga membuat kebutuhan akan informasi menjadi semakin cepat dan mudah bagi para pemberi informasi agar dapat mempunyai sebuah media. Kebutuhan akan informasi yang

begitu besar dan cepat membuat media menjadi suatu jembatan yang digunakan untuk meneruskan pesan dan informasi saat komunikasi interpersonal sudah tidak dapat mengatasinya. Dilain sisi meskipun telah berkembangnya teknologi dan informasi yang memadai sebagai sarana dan prasarana dalam menyampaikan suatu informasi kepada publik tetapi masih saja ada kendala yang sering dihadapi dalam proses penyampaian informasi tersebut. Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu dari sekian banyak kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Raja Ampat sendiri merupakan sebuah kabupaten pemekaran dari wilayah Kabupaten Sorong pada tahun 2002 berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, dengan ibukota kabupaten ialah waisai. Kabupaten Raja Ampat merupakan kabupaten yang terdiri dari susunan dan gugusan pulau-pulau serta terdiri atas 11 Distrik dan 85 Kampung di luas wilayah 6.084,5 km². Raja Ampat sendiri memiliki sekitar 93.918 jiwa pada tahun 2019. Salah satu penyebab utama dalam tertinggalnya pelayanan publik yang ada di Kabupaten Raja Ampat adalah bentuk dari kabupaten Raja Ampat itu sendiri yang mana berbentuk kepulauan yang membuat jarak antara satu pulau ke pulau lainnya menjadi menjadi penghambat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena di tiap pulau belum tersedianya jaringan internet yang dapat menyediakan koneksi internet yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses penerimaan informasi dari pemerintah. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan gencar berusaha untuk membangun jaringan yang dapat menghubungkan antara masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang sulit di jangkau dengan pusat pemerintahan yang ada di kota waisai sehingga dapat mempermudah dalam proses penyampaian informasi publik kepada aparatur yang bekerja di lingkup distrik maupun lingkup kelurahan dan kampung. Pada Bulan April tahun 2021 kemarin Kabupaten Raja Ampat terpilih sebagai satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat yang melaksanakan program Kota Pintar atau Smart City Milik Pemerintah pusat tahun 2021. Raja Ampat terpilih karena sesuai dengan program prioritas Presiden Joko Widodo tentang sepuluh kawasan pariwisata nasional, maka Raja Ampat terpilih agar dapat meningkatkan potensi pariwisata Raja Ampat seperti bali. Oleh karena itu program smart city ini ditunjukkan agar membuat seluruh entitas Organisasi Perangkat Daerah yang ada dapat mendukung raja ampats menjadi kawasan yang setingkat bahkan lebih dari pada Bali, dan menjadikan Raja Ampat bisa dikenal secara nasional maupun internasional. Salah satu program yang dapat membuat Program Smart City ini berjalan adalah dengan memastikan bahwa E-Government atau Pemerintahan Elektronik itu sudah berjalan sebagai jalan awal smart city.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Dalam Penerapan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat yaitu Pada Bulan April tahun 2021 kemarin Kabupaten Raja Ampat terpilih sebagai satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat yang melaksanakan program Kota Pintar atau Smart City Milik Pemerintah pusat tahun 2021. Oleh karena itu program smart city ini ditunjukkan agar membuat seluruh entitas Organisasi Perangkat Daerah yang ada dapat mendukung raja ampats menjadi kawasan yang setingkat bahkan lebih dari pada Bali, dan menjadikan Raja Ampat bisa dikenal secara nasional maupun internasional. Salah satu program yang dapat membuat Program Smart City ini berjalan adalah dengan memastikan bahwa E-Government atau Pemerintahan Elektronik itu sudah berjalan sebagai jalan awal smart city. E-Government Merupakan suatu sistem terkonologi informasi yang di kembangkan oleh pemerintah untuk peningkatan pelayanan publik dengan memberikan pilihan

kepada masyarakat agar dapat mengakses informasi dengan mudah. Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan pelayanan publik yang lebih baik serta lebih efektif dan efisien membutuhkan strategi dan perkembangan penerapan kebijakan yang berkaitan dengan E-Government. Kebijakan E-Government sendiri diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government di semua level pemerintahan secara menyeluruh. Hal ini membuat sosialisasi terhadap E-Government perlu dilakukan secara konsisten dan terus menerus dan konsisten kepada masyarakat karena masyarakat mengenai manfaat yang dapat mereka ambil dari penerapan E-Government ini. digitalisasi ini membuat dan mengharuskan semua orang mampu untuk memiliki keahlian dalam menggunakan internet sebagai media untuk mencari informasi. Hal ini yang sedang diterapkan dengan program kerja pemerintah daerah untuk menerapkan E-Government yang dapat membantu kinerja pemerintah daerah. Akhirnya Presiden pun mengeluarkan kebijakan untuk setiap kota dan kabupaten untuk dapat mempunyai Program E-Government dengan tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi secara cepat dan tepat untuk menghindari isu yang beredar di masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Dalam Penerapan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Penelitian Nun berjudul *Analisis Strategi Komunikasi Dalam E-Government Di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara*, menemukan bahwasannya strategi dalam penerapan E-Government serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di daerah yang mana hal ini tidak akan maju apabila tidak imbangi dari kesejahteraan pelaksanaan dan keberhasilan dalam penerapan E-Government yang harus di dukung oleh sumber daya manusia untuk mengembangkan teknologi informasi komunikasi khususnya E-Government yang berada di lingkup pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara bisa lebih baik.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Desriani Paulina Nainggolan yang berjudul *Strategi Penerapan E-Government Di Kota Pekanbaru*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya Dalam perkembangan serta implementasi e-government di kalangan pemerintah, yang mana hampir seluruh aplikasi serta website yang digunakan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya akan dipergunakan oleh pemerintah maupun stakeholders dalam proses pengambilan keputusan. Hal lain yang dibahas dalam penelitian ini juga berupa permasalahan yang dijelaskan secara signifikan dalam proses penerapan e-government.

Penelitian berikutnya yaitu dari Zainal A. Hasibuan yang berjudul *Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemda* yang berkesimpulan bahwasannya sistem informasi secara umum dan sistem informasi nasional dengan perbandingan pada penerapan E-government yang ada di negara-negara lain seperti Malaysia yang memulai langkah strategis hingga semua kegiatan yang mencakup pada satu-satunya data kependudukan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya, selain itu lokasi penelitian yang dilakukan berada pada Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Berbeda dari Nun, Desriani Paulina Nainggolan, Zainal A. Hasibuan. Selain itu program smart city ini ditunjukkan

agar membuat seluruh entitas Organisasi Perangkat Daerah yang ada dapat mendukung raja ampat menjadi kawasan yang setingkat bahkan lebih dari pada Bali, dan menjadikan Raja Ampat bisa dikenal secara nasional maupun internasional. Salah satu program yang dapat membuat Program Smart City ini berjalan adalah dengan memastikan bahwa E-Government atau Pemerintahan Elektronik itu sudah berjalan sebagai jalan awal smart city.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana strategi dinas komunikasi informatika, statistic dan persandian dalam penerapan e-government dilinkup pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat serta mengetahui hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Dalam Penerapan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Raja Ampat, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi dan Kepala Seksi Pengelolaan E-Government dan Aplikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Dalam Penerapan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat menggunakan teori dari F. Rangkuti. Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur strategi yaitu Strength, Weakness, Oportunities, Threat. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Strength

Pemanfaatan teknologi oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dalam penggunaan media yang dapat digunakan untuk pengembangan E-Government juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Raja Ampat dalam mendapatkan berbagai informasi pelayanan terkait pemerintahan. Dengan adanya Program E-Government ini, diharapkan dapat membantu instansi pemerintah untuk memberikan berbagai informasi serta pelayanan misalnya dalam proses pembuatan kartu keluarga apa saja yang menjadi persyaratan dan bagaimana proses pembuatan kartu keluarga sehingga mudah digunakan oleh masyarakat. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat mempunyai sebuah website yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Raja Ampat, yang mana website tersebut baru saja diluncurkan pada awal tahun 2022 ini. Suatu sistem pemerintahan

yang berjalan dikatakan menjadi hak milik pemerintah daerah apabila hal tersebut berasal dari pembelian ataupun yang di bangun sendiri, serta di biayai langsung dari APBN serta kegiatan perekonomian daerah

3.2 Weakness

Dalam pengembangan obyek wisata, besar kecilnya anggaran sangat berpengaruh baik untuk pengadaan, pengendalian maupun pemeliharaan fasilitas pada suatu instansi pemerintahan. Dalam setiap perencanaan membutuhkan besaran anggaran yang sesuai dengan kebutuhan suatu program dan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 3 ayat (2) bahwa pengelolaan barang milik negara/ daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Untuk Penerapan E-Government di Kabupaten Raja Ampat sendiri dibutuhkan jumlah anggaran yang cukup besar karena Objek E-Government yang perlu dikembangkan sangat banyak. Terlebih pada instansi pemerintahan yang sangat berpotensi namun letaknya yang tersembunyi dan akses informasi yang terbatas. Salah satu faktor penentu merupakan Sarana dan Prasarana sebagai penentu dalam keberhasilan Penerapan E-Government. Kebutuhan serta keinginan penguasaan layanan dapat dipenuhi dengan adanya sarana prasarana yang menunjang. Kurangnya sarana dan prasarana dapat menjadi penghambat perkembangan E-Government. Saat ini sarana dan prasarana di beberapa Instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Raja Ampat masih kurang memadai sementara untuk mengoptimalkan perkembangan E-Government ini perlu didukung dengan ketersediaan berbagai sarana prasarana. Selain itu Dinas Komunikasi informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat juga bekerja sama serta membuat beberapa website untuk instansi pemerintahan lain yang bertujuan untuk memperlancar penerapan E-Government ini, hal ini membuat Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan lainnya serta membantu membuat Website untuk instansi tersebut sehingga dapat memudahkan dalam proses pelayanan serta pemberian informasi.

3.3 Oportunities

Dinas Komunikasi informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat juga bekerja sama dengan pihak swasta agar terwujudnya penerapan E-Government yang baik di Kabupaten Raja Ampat. Salah satunya yaitu pihak BAKTI dari kominfo yang mana kerja sama antar Dinas Komunikasi informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat dan pihak BAKTI ini di karenakan wilayah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan daerah kepulauan sehingga membuat akses antar pulau menjadi susah, sehingga di butuhkan pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station) di sejumlah kampung yang ada di kabupaten Raja Ampat. selanjutnya Salah satu peluang yang dapat meningkatkan proses penerapan E-Government menjadi lebih baik di Kabupaten Raja Ampat adalah dengan melaksanakan pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN yang ada di Dinas Komunikasi informatika, Persandian dan Statistik maupun ASN yang ada di instansi pemerintahan yang lainnya. Salah satu pelatihan bagi ASN yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik untuk meningkatkan Kemampuan ASN yang ada, maka Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik(DiskominfoSantik) melaksanakan

pelatihan Jurnalistik dan Videografi yang dilakukan di Jogjakarta. Hal ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana di tugas kehumasan pemerintah daerah menjadi tugas dari dinas kominfo.

3.4 Threats

Adapun salah satu faktor eksternal atau faktor dari luar yang berpengaruh dalam penerapan E-Government di Kabupaten Raja Ampat ialah ketersediaan Sumber daya. Ketersediaan sumberdaya ini di butuhkan untuk memenuhi asas dan manfaat dalam penerapan E-Government karena ini merupakan faktor yang sangat menunjang dalam penerapan E-Government. Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan E-Government di Kabupaten Raja Ampat yang masih kurang menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam proses penerapan E-Government ini. Untuk ini diperlukan adanya penambahan sumberdaya baik berupa sumber daya Manusia (Tenaga Ahli) ataupun sumberdaya yang berasal dari pihak ketiga atau pihak swasta yang dapat mendukung percepatan terlaksananya proses Penerapan E-Government ini.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Kesuksesan Dinas Komuikasi Informatika, Persandian dan Statistik dalam Penerapan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah di Kabupaten Raja Ampat dilihat dari Adanya Kemauan daripada pimpinan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat dalam menerapkan mendukung pelayanan berbasis elektronik di semua instansi yang ada di kabupaten Raja Ampat yang telah di dasari oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Terpenuhinya faktor pendukung sumber daya sehingga sukses nya penerapan E-Government oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat dan Terpenuhinya sumber daya finansial yang berasal dari APBD serta APBN.

Program ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Nun (Nun, 2020) namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu Belum tersedianya regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang Penerapan E-Government ini.

Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian Desriani Paulina Nainggolan (Desriani Paulina Nainggolan, 2018) dimana Tersedinya Sumber daya Manusia yang berkompeten dalam menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan E-Government sehingga pelayanan Berbasis Elektionik ini dapat berjalan dengan baik. Baik itu di Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik maupun di instansi pemerintahan yang lain.

Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Dalam Penerapan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat juga mempunyai kekurangan lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu Untuk Penerapan E-Government di Kabupaten Raja Ampat sendiri dibutuhkan jumlah anggaran yang cukup besar karena Objek E-Government yang perlu dikembangkan sangat banyak. Terlebih pada instansi pemerintahan yang sangat berpotensi namun letaknya yang tersembunyi dan akses informasi yang terbatas seperti temuan Zainal A. Hasibuan (Zainal A. Hasibuan,2020).

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Dalam Penerapan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat ini yaitu dalam pengembangan obyek wisata, besar kecilnya anggaran sangat berpengaruh baik untuk pengadaan, pengendalian maupun pemeliharaan fasilitas pada suatu instansi pemerintahan. Dalam setiap perencanaan membutuhkan besaran anggaran yang sesuai dengan kebutuhan suatu program dan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 3 ayat (2) bahwa pengelolaan barang milik negara/ daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Untuk Penerapan E-Government di Kabupaten Raja Ampat sendiri dibutuhkan jumlah anggaran yang cukup besar karena Objek E-Government yang perlu dikembangkan sangat banyak. Terlebih pada instansi pemerintahan yang sangat berpotensi namun letaknya yang tersembunyi dan akses informasi yang terbatas. Salah satu faktor penentu merupakan Sarana dan Prasarana sebagai penentu dalam keberhasilan Penerapan E-Government. Kebutuhan serta keinginan penguasaan layanan dapat dipenuhi dengan adanya sarana prasarana yang menunjang. Kurangnya sarana dan prasarana dapat menjadi penghambat perkembangan E-Government. Saat ini sarana dan prasarana di beberapa Instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Raja Ampat masih kurang memadai sementara untuk mengoptimalkan perkembangan E-Government ini perlu didukung dengan ketersediaan berbagai sarana prasarana. Selain itu Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat juga bekerja sama serta membuat beberapa website untuk instansi pemerintahan lain yang bertujuan untuk memperlancar penerapan E-Government ini, hal ini membuat Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan lainnya serta membantu membuat Website untuk instansi tersebut sehingga dapat memudahkan dalam proses pelayanan serta pemberian informasi. Selain itu pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan dan administrasi masih kesulitan dan dilakukan secara manual, selain itu belum adanya penerapan E-Planning, E-Budgeting dan E-Monev.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dalam penerapan e-government pada lingkup Kabupaten Raja Ampat bahwa dinas tersebut telah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika yang di dalamnya terdapat juga tugas dan fungsi dari dinas kominfo dan telah sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, namun ada juga beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana, wilayah pemerintahan yang berbentuk kepulauan membuka akses antar pulau menjadi terbilang sulit di jangkau dan kurangnya anggaran..

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat F. Rangkuti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Dalam Penerapan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Raja Ampat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budio, S. (2019). STRATEGI MANAJEMEN SEKOLAH. *JURNAL MENATA*, 56.
- Farida, I. (2020). *The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia*, 341.
- Hamdi, A. S. (2011). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF APLIKASI DALAM*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Satriya, E. (2016). *PENTINGNYA REVITALISASI E-GOVERNMENT*, 39.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Prawiro, M. (2019, Januari 01). *Pengertian Penelitian: Definisi, Tujuan, dan Ciri-Ciri Penelitian*. Retrieved from Maxmanroe.com: <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-penelitian.html>
- RI, B. (2020, 1 1). *Profil Entitas Kabupaten Raja Ampat*. Retrieved from PAPUA BARAT - BPK RI: <https://papuabarat.bpk.go.id/kabupaten-raja-ampat/>